

**PERANAN PONDOK PESANTREN BALEBO DALAM MELAHIRKAN  
POLA PIKIR DAN ZIKIR SERTA KORELASINYA DALAM  
PEMBANGUNAN OTONOMI DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada  
Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

**IAIN PALOPO**  
Oleh,

**ERWINA**  
NIM. 07.16.2.0072

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBİYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PALOPO**

**2 0 1 2**

**PERANAN PONDOK PESANTREN BALEBO DALAM MELAHIRKAN  
POLA PIKIR DAN ZIKIR SERTA KORELASINYA DALAM  
PEMBANGUNAN OTONOMI DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada  
Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

Oleh,

**ERWINA**

NIM. 07.16.2.0072

**Dibawa Bimbingan:**

- 1. Drs. H. Syarifuddin Daud, MA.**
- 2. H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.I.**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBİYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PALOPO**

**2 0 1 2**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERWINA**  
NIM : 07.16.2.0072  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Jurusan : Tarbiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 02 Juli 2012

Penyusun,

**ERWINA**  
Nim. 07.16.2.0072

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setingginya-tingginya kepada:

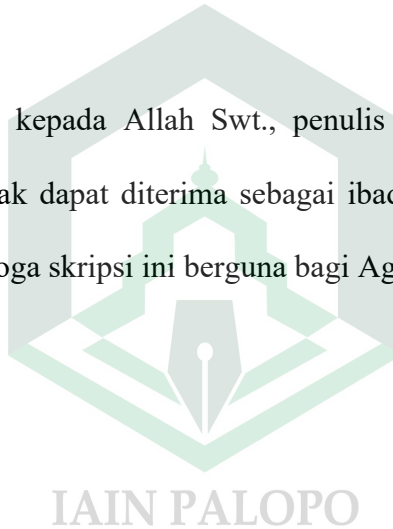
1. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum., selaku Ketua STAIN Palopo, yang senantiasa membina di mana penyusun menimba ilmu pengetahuan.
2. Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc., M.A., selaku mantan Ketua STAIN Palopo, yang senantiasa membina di mana penyusun menimba ilmu pengetahuan.
3. Ketua Jurusan Tarbiyah, Drs. Hasri, MA., dan Sekertaris Jurusan Tarbiyah, Drs. Nurdin Kaso, M.Pd., yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di STAIN Palopo.
4. Drs. H. Syarifuddin Daud, MA., dan H. Rukman Abd. Rahman Said, Lc., M.Th.I., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan skripsi penulis, sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

5. Kepala perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup STAIN, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

6. Kedua orang tua tercinta yang telah memelihara dan mendidik sejak lahir hingga dewasa dengan penuh pengorbanan lahir dan batin.

7. Kepada semua saudara-saudaraku dan teman-teman yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt., penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa Amin



Palopo, 02 Juli 2012

Penulis

IAIN PALOPO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Hipotesis.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Pengertian Judul .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Definisi, Sistem dan Tujuan Pendidikan serta Tipologi Pondok Pesantren .....	11
B. Peranan Pondok Pesantren dalam Melahirkan Pola Pikir dan Zikir .....	19
C. Pesantren sebagai Wadah Pembentukan Pola Pikir dan Zikir Kaitannya dengan Pembangunan Otonomi Daerah .....	25
D. Kerangka Pikir .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Desain Penelitian.....	37
B. Instrumen Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel .....	39
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	42

<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	43
B. Pondok Pesantren dalam Menghadapi Pembangunan Otonomi Daerah.....	49
C. Tipologi Pesantren untuk Mendukung Otonomi Daerah .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kondisi Keseluruhan Siswa Pesantren Balebo Tahun Ajaran 2010/2011.....	46
Tabel 2	Keadaan Guru Pesantren Balebo Tahun Ajaran 2010/2011 .....	47
Tabel 3	Sarana dan Prasarana Pesantren Balebo Tahun Ajaran 2010/2011 .....	49





## ABSTRAK

Erwina, 2012. *“Peranan Pondok Pesantren Balebo dalam Melahirkan Pola Pikir dan Zikir serta Korelasinya dalam Pembangunan Otonomi Daerah Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah. Pembimbing (I) Drs. H. Syarifuddin Daud, MA. dan Pembimbing (II) H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., MA.

Kata Kunci: Pondok Pesantren Balebo, Pola Pikir dan Dzikir, Otonomi Daerah.

Skripsi ini membahas tentang peranan pondok Pesantren Balebo dalam melahirkan pola pikir dan zikir serta korelasinya dalam pembangunan Otonomi Daerah Kabupaten Luwu Utara di mana penelitian ini memadukan berbagai macam metode dalam penelitian dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pada saat penelitian dilakukan para responden perlu memiliki persepsi, penghayatan, pengalaman dan penilaian tertentu yang merefleksikan persepsi tersebut terhadap semua aspek kegiatan dan keadaan di pesantren tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam alternatif jawaban dari objek yang dikaji, yakni 1). Observasi, atau kegiatan yang dilakukan penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti dengan kenyataan yang ada. 2) Wawancara, atau suatu instrumen penelitian melalui pendekatan individu, berupa tanya jawab langsung terhadap beberapa informan yang dianggap dapat memberikan jawaban yang akurat serta sistematis, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 3) Observasi, di mana penulis mengadakan pengamatan langsung di lapangan menganalisa berbagai macam kegiatan yang berlangsung guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dan diolah secara kualitatif dan dijadikan acuan dasar untuk menganalisa secara kualitatif terhadap suatu permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan memberikan hasil tentang peranan pondok Pesantren Balebo dalam melahirkan pola pikir dan dzikir serta korelasinya dalam pembangunan Otonomi Daerah.

Hasil penelitian ini dapat mempertinggi mental-mental budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta membina/mengembangkan fisik yang kuat dan sehat yaitu jasmani dan rohani, guna berdaya saing tinggi dalam pembangunan otonom serta mampu melahirkan luaran yang optimal.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Upaya pembentukan manusia yang beriman, bertaqwa dan berkepribadian luhur merupakan inti dari tujuan pendidikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 4 sebagai berikut :

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>1</sup>

Tujuan ideal tersebut melibatkan agama sebagai salah satu elemen penting bahkan paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, diperlukan pemahaman dan pengamalan agama secara paripurna. Demikian pula untuk menjadi manusia muslim seutuhnya, diperlukan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang utuh dan komprehensif bukan secara parsial. Dalam upaya membentuk manusia muslim yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terlebih dulu ditanamkan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam, karena Islam mengajarkan keseimbangan yang utuh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

---

<sup>1</sup> Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Gunung Sari, t.th.), h. 4.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama pembangunan nasional. Oleh karena itu, asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus menjadi jiwa, motor penggerak, dan pengendali pembangunan nasional. Keduanya harus menjadi landasan spriritual, moral, dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengejawantahan dan pengamalan Pancasila.<sup>2</sup>

Bila diamati tujuan ideal tersebut, maka kurikulum nasioanal harus mengarah kepada hal tersebut. Oleh karena itu, dalam pasal 39 UUSPN disebutkan : Isi kurikulum setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan harus memuat: 1). Pendidikan Pancasila, 2). Pendidikan Agama, dan 3). Pendidikan Kewarganegaraan.<sup>3</sup> Karena itu, apabila pendidikan agama tidak diterapkan dengan baik, maka itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap GBHN dan UUSPN.

Sistem pendidikan nasional harus mengacu pada ketiga komponen di atas. Dengan demikian, pendidikan yang berwajah “dikotomis” adalah sistem yang harus mengalami reformasi. Tampaknya, bentuk reformasi dari yang berwajah dua (dikotomis) baca : umum dan agama. Itu sudah sangat urgen dilakukan dan waktunya adalah sekarang dengan mengacu kepada Pasal 29 dan 31 (semua ayatnya).

Pondok pesantren atau madrasah misalnya, harus mengembangkan sistem pendidikan terpadu. Demikian pula sekolah umum, pendidikan agama tidak boleh

---

<sup>2</sup> Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta : CV. Amisco, 1996), h. 77.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 78

“dianaktirikan”. Pesantren-pesantren yang ada sekarang harus memberikan. Bobot yang seimbang antara pelajaran “umum” dan pelajaran “agama” meskipun pada awalnya dilakukan dalam bentuk ekstra kurikuler. Ini dilakukan dalam rangka membentuk manusia bertakwa dan menghilangkan dikotomi antara ilmu “umum” dan agama.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, al-Quran al-Qashas (28) : 77

memberikan penjelasan sebagai berikut :



Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>4</sup>

Kenyataan ini bukan tanpa masalah, karena jika berpegang pada undang-undang dan ketentuan yang ada, memasukkan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional akan memberikan angin segar kepada umat Islam. Dengan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah memang akan mendapat sistem pendidikan nasional, madrasah memang akan mendapat status yang sama dengan sekolah tetapi,

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 197.

dengan status ini terdapat konsekuensi bahwa madrasah itu salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan umum dan agama.<sup>5</sup>

Di abad 21 memang pesantren sudah ada sebagian yang berorientasi kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah memang banyak sekedar tidak mengatakan kebanyakan berada di pedesaan. Kondisi fisiknya seringkali tidak lebih baik daripada sekolah-sekolah umum. Jumlah dan kualitas gurunya seringkali lebih rendah. Ini merupakan kesalahan umat Islam sendiri terutama para cendikiawannya yang kurang memberi perhatian.<sup>6</sup> Padahal, madrasah, dan pesantren merupakan aset umat Islam yang sungguh mahal harganya.

Untuk mencapai manusia yang berbudi pekerti luhur pesantren sebagai salah satu komponen penting. Hal ini karena Islam datang untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.<sup>7</sup> Kehadiran pesantren, madrasah dan sekolah umum memiliki kesamaan tujuan yakni melahirkan manusia sebagaimana yang tertera dalam tujuan pendidikan nasional, terutama dalam menghadapi persaingan global. Diterapkannya otoda, tidak akan sunyi dari berbagai tantangan dahsyat. Agama diharapkan dapat mengurangi, mengantisipasi, dan memberi petunjuk dan solusi yang terbaik. Oleh

---

<sup>5</sup> Maksum Mukhtar, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya* (Cet. III; Jakarta: PT. Wacana Ilmu, 2001), h. 147.

<sup>6</sup> Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam, *Pembaharuan Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: DPP GUPPI, 1993), h. 133-134.

<sup>7</sup> Mappanganro, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam* (Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1999), h. 8.

karena itu, pesantren khususnya, diharapkan melahirkan manusia-manusia pembangun yang bermoral tinggi.

Pesantren “Balebo” Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang diharapkan tampil berperan aktif dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Terbentuknya pola pikir dan dzikir yang mantap melalui lembaga ini diharapkan luarannya mampu tampil berperan aktif dalam menyongsong otonomi daerah.

### ***B. Rumusan dan Batasan Masalah***

Berdasarkan gambaran singkat di atas, maka muncul berbagai permasalahan mendasar sebagai berikut :

1. Peranan pondok pesantren Balebo di Kabupaten Luwu Utara dalam membentuk pola pikir dan dzikir para santri?
2. Bagaimana peluang dan tantangan pesantren dalam menghadapi otonomi daerah?
3. Bagaimana tipologi pesantren yang tepat untuk mendukung otonomi daerah Kabupaten Luwu Utara yang efektif?

### ***C. Hipotesis***

Berdasarkan pengamatan sementara terhadap Pondok Pesantren Balebo dan beberapa teori tentang pesantren maka dapat diprediksi berdasarkan rumusan yang

dikemukakan dalam tulisan ini, maka sebagai hipotesis dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Peranan Pondok Pesantren Balebo di Kabupaten Luwu Utara dalam membentuk pola pikir dan dzikir para santri telah turut mewarnai kesadaran masyarakat Kabupaten Luwu Utara umumnya dan luaran pesantren khususnya.

2. Peluang dan tantangan sebagai dua elemen dalam analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) harus menjadi perhatian yang serius dari banyak kalangan khususnya oleh para pembina pondok pesantren. Peluang dan tantangan Pondok Pesantren Balebo di masa depan adalah sebagai berikut :

a. Peluang pesantren ini adalah sangat strategis sepanjang tetap mengikuti perkembangan zaman. Mendesain kurikulum yang prediktif ke depan sesuai dengan pembangunan otonomi daerah Kabupaten Luwu Utara.

b. Tantangan Pesantren Balebo adalah tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal pesantren ini adalah masalah manajemen, perebutan kekuasaan dan kredibilitas kepemimpinan. Sedangkan tantangan eksternal adalah tuntutan masyarakat terhadap pesantren melebihi kemampuan pesantren. Di samping itu, kecemburuan pihak luar untuk mengambil alih pesantren. Sementara kendalanya adalah dana dan ketiadaan interkoneksi antar pesantren serta relasi dengan pemerintah setempat.

3. Tipologi pesantren yang tepat untuk mendukung otonomi daerah Kabupaten Luwu Utara secara efektif adalah pesantren yang antisipatif dan prediktif terhadap tuntutan kemajuan masyarakat. Pesantren yang tepat seiring dengan perkembangan

zaman, yakni mampu membentuk keseimbangan kemampuan kebutuhan spritual dan material umat. Hal ini berarti pembentukan keimanan dan keterampilan praktis para santri dan luaran pesantren.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui peranan Pondok Pesantren Balebo Kabupaten Luwu Utara dalam upaya pembentukan pola pikir dan dzikir bagi luaran dan santrinya. Hal ini dilakukan agar pesantren tersebut dapat memperbaiki hal-hal yang dianggap penting. Di samping itu, meningkatkan hal-hal yang memiliki cikal bakal yang perlu ditumbuhkembangkan.

Hal ini perlu diteliti melalui prosedur ilmiah karena pondok pesantren pada umumnya merupakan aset pembangunan yang sungguh sangat mahal harganya. Padahal, terkadang pula tidak banyak mendapat perhatian pemerintah dan kaum muslimin, khususnya paran cendekiawan dan hartawan dari kalangan orang-orang muslim. Hal inilah bersama beberapa hal lainnya memperhadapkan pesantren dengan dua kemungkinan, baik peluang maupun tantangan sistem pendidikan pondok pesantren. Tantangan yang berat dihadapi pondok pesantren, khususnya Pondok Pesantren Balebo sebagai misal yang perlu pembuktian. Hal ini penting dalam rangka mengantisipasi atau mengeliminir berbagai tantangan itu agar mampu memainkan pesan dalam, era otonomi daerah Kabupaten Luwu Utara.



Adapun tujuan secara khusus penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan Pondok Pesantren Balebo dalam membentuk cara berpikir dan berperilaku dengan moral yang didasarkan pada nilai-nilai religius.
- b. Untuk mengetahui sistem dan tantangan yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Balebo dalam menghadapi otonomi daerah Kabupaten Luwu Utara.
- c. Untuk mengetahui tipologi pesantren yang tepat dalam melangkah menghadapi otonomi daerah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang berbagai peranan pondok pesantren dalam upaya pembentukan manusia paripurna.
- b. Untuk menjadi bahan masukan bagi para tenaga edukasi yang mengajar di dalam pondok pesantren khususnya dan pesantren-pesantren umumnya.
- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pengajaran di pesantren.
- d. Untuk mengusulkan kepada pemerintah setempat/daerah sebagai mitra pesantren dalam pembangunan daerah tentang pentingnya dibina dan dilestarikan pondok pesantren dengan mencari cara terbaik.

### ***E. Pengertian Judul***

Untuk menghindari kemungkinan banyaknya interpretasi dan kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka perlu dikemukakan pengertian tentang beberapa kata kunci dalam rumusan judul tersebut.

Peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>8</sup> Pondok adalah bangunan tempat tinggal yang berpetak-petak yang berdinging bilik dan beratap rumbia, "tempat tinggal beberapa keluarga). Ada pula pengertian lain bahwa pondok adalah madrasah dan asrama (tempat mengaji, belajar agama Islam),<sup>9</sup> dan lain-lain. Yang kedua inilah yang paling tepat dalam pengertian judul di atas, karena dihubungkan dengan pesantren. Pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya, terkadang pula disamakan dengan pondok.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa peranan pondok pesantren dalam konteks ini merupakan bagian yang dapat dimainkan atau diperankan oleh suatu lembaga pendidikan Islam yang bertipologi pondok pesantren atau *takhassus* untuk mengaji atau belajar Islam bagi pesertanya.

Lembaga ini diharapkan mampu melahirkan dan membentuk pola pikir bagi santrinya. Pola pikir dalam hal ini adalah sistem atau cara kerja keilmuan, berpikir

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi II, Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 751.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 781.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 762.

terstruktur untuk melahirkan pikiran yang konstruktif dan positif, serta progresif.<sup>11</sup> Di samping itu, diharapkan pula pikiran yang dihasilkan itu tidak gersang, maka harus berdampingan dengan zikir yakni, puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang.<sup>12</sup> Ini menunjukkan bahwa puji-pujian ini merupakan suatu tata kerja kalbu untuk melahirkan kebersihan jiwa untuk melahirkan perbuatan yang baik berdasarkan hati nurani.

Korelasi, secara leksikal adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat.<sup>13</sup> Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Berotonomi berarti memerintah sendiri, mengatur daerah sendiri.

Secara garis besarnya, judul di atas mengandung makna bahwa pesantren sebagai institusi pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan luaran yang memiliki pola pikir (intelektual) dan dzikir (spritual) sebagai upaya menyikapi secara aktif dan positif pemberlakuan otonomi daerah, khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Pesantren Balebo yang berada di Kabupaten Luwu Utara tersebut merupakan aset pembangunan daerah.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 767 - 768.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 1136.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 526.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 565.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### ***A. Definisi, Sistem dan Tujuan Pendidikan serta Tipologi Pondok Pesantren***

##### 1. Pengertian Pondok Pesantren

Menurut Mastuhu, bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman penilaian sehari-hari.<sup>1</sup>

Pesantren adalah lembaga pendidikan berasrama untuk mempelajari agama Islam. Kadang-kadang lembaga seperti ini mencakup ruang lingkup yang luas sekali dan mata pelajaran yang diberikan dapat meliputi tafsir, hadist, ilmu kalam, fiqhi, tauhid dan tasawuf. Namun demikian tidaklah pesantren hanya memberikan pelajaran agama semata, tetapi juga memberikan mata pelajaran umum dalam kelas.

Menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam menjelaskan bahwa baru dikatakan pesantren apabila memenuhi lima syarat, yaitu: ada kiyai, ada pondok, masjid, santri dan ada pengajar yang membaca kitab kuning.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Cet. VI; Jakarta: Pustaka Imani, 1994), h. 55.

<sup>2</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992), h. 199.

Peran pesantren di masa lalu kelihatan sangat menonjol dalam hal menggerakkan, memimpin dan melakukan perjuangan dalam rangka mengusir penjajah, sulit mencari gerakan melawan penjajah di Indonesia ini yang bukan digerakkan dan dipimpin oleh orang pesantren, itu mudah dipahami karena orang pesantren adalah orang Islam yang imannya dapat diandalkan. Peran pesantren pada masa sekarang juga amat sangat jelas, contohnya yang paling nyata ialah banyaknya pemimpin politik “mendekati” pesantren, terutama menjelang pemilihan umum.

Peran pesantren dimasa-masa akan datang agaknya tetap besar, gejala yang ada sekarang dapat dijadikan indikator untuk meramal demikian, himpitan “kesulitan” hidup, baik dalam arti himpitan “ke atas” maupun dalam himpitan “ke bawah” menyebabkan sesaknya dada, bimbangannya pemikiran, telah menyebabkan pula hilangnya keseimbangan antara pertimbangan akal dan pertimbangan hati, ini menjadi salah satu penyebab orang pergi ke pesantren. Mereka menyangka keseimbangan itu dapat diperoleh di pesantren, dan sangkaan itu tidak terlalu meleset.

Dari sekian banyak pendapat tentang pesantren yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi pendapat tentang pesantren seperti Zamazhari Dhofier mengatakan bahwa baru dapat dikatakan apabila sekurang-kurang ada lima elemen, yaitu: ada pondok, ada masjid, kiyai, santri, dan pengajian kitab Islam klasik.<sup>3</sup> Penjelasan ini mungkin diperlukan, karena adakalanya menyebut pesantren padahal disana tidak ada unsur tersebut di atas.

---

<sup>3</sup> Zamazhari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 42.

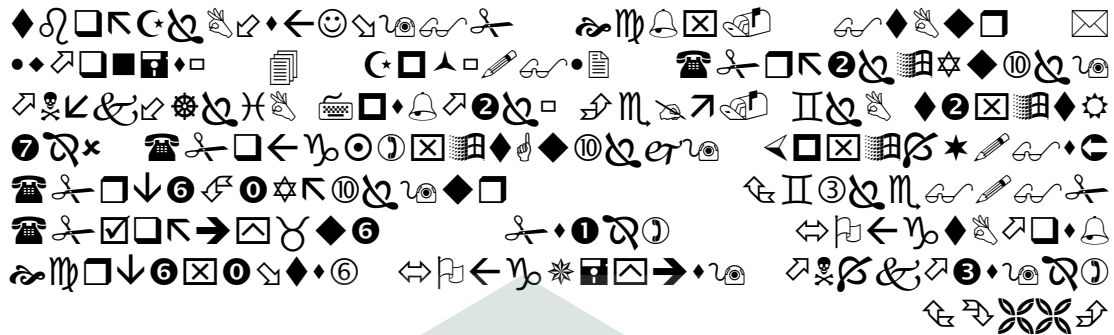
Pesantren sebagaimana penulis telah gambarkan dari berbagai pendapat yang tersebut diatas, maka pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam (*Islamic Education Institution*) yang berdiri serta tumbuh dengan sendirinya dalam masyarakat, sedang landasan yuridis formal belum dirumuskan oleh pemerintah.

## 2. Sistem Pendidikan Pesantren

Seluruh pendidikan pesantren berangkat dari sumber yang sama, yaitu ajaran Islam, namun terdapat perbedaan filosofis di antara mereka dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam pada bidang pendidikan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang melingkarinya. Perbedaan-perbedaan pada dasarnya berpulang pada pandangan hidup kiyai yang memimpin pesantren mengenai konsep teologi, kehidupan manusia, tugas dan tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan pendidikan. Dalam kenyataan masing-masing pesantren mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan tekanan bidang studi yang ditekuni dan gaya kepemimpinan yang dibawahinya seperti pesantren Balebo ini. Sistem pendidikan yang berlaku adalah sistem campuran antara sistem madrasah dengan sistem pesantren itu sendiri. Dalam arti bahwa kedua sistem ini digunakan dalam lembaga pendidikan. Hanya saja apabila dibuat perbandingan penggunaan di antara kedua sistem tersebut, maka pesantren Balebo lebih banyak menggunakan sistem madrasah yang dikenal dengan istilah klasikal.

Dengan berbagai usaha, seorang guru dalam menyebarkan ilmunya kepada peserta didiknya demi manambah pengetahuan, pembentukan sikap yang lebih baik. pemahaman perluasan minat, penghargaan norma-norma, kecakapannya dan lainnya

atau penyebaran ilmu pengetahuan kepada manusia, atau masyarakat. Hal itu dipandang sangat mulia oleh ajaran agama Islam, berdasarkan petunjuk Q.S. At-Taubah (9) : 122 yaitu:



Terjemahnya:

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.<sup>4</sup>

Dari firman Allah Swt., di atas, maka dapat diambil pelajaran bahwa seorang guru hendaknya tidak hanya mampu memerintah atau memberikan teori kepada siswa, akan tetapi lebih dari itu ia harus mampu menjadi panutan bagi siswanya. Klasikal berarti bahwa pelajaran diberikan dengan sistem kelas, di mana kelompok pelajar (santri) mengikuti pelajaran dalam ruang dan waktu yang sama serta umur mereka kurang lebih sebaya. Adapun penggunaan sistem kitab atau pesantren dalam lembaga ini adalah dimaksudkan untuk membantu para santri dalam memperdalam dan memperluas cakrawala pengetahuannya, berhubung dengan adanya anggapan bahwa penyampaian ilmu dengan sistem madrasah tidak cukup memadai.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang Thoha Putra, 2000), h. 302.

Lagi pula buku-buku yang dipakai sebagian besar dalam bahasa Indonesia yang berarti tidak melatih kemampuan bahasa Arab para santri untuk membaca dan menguasai kitab-kitab yang lebih tinggi.

Sistem madrasah dan pesantren termasuk salah satu organisasi yang tunduk pada sistem sosial dan budaya lingkungannya, yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat serta mendapat pengakuan dan dukungan. Jadi fungsi-fungsi madrasah dan pesantren diselenggarakan menurut norma-norma dan aturan masyarakat.

Pusat-pusat pendidikan Islam dewasa ini mengembangkan sistem pendidikan campuran, yakni sistem pendidikan madrasah dan sistem pendidikan pesantren meskipun nama pusat pendidikan tersebut menyebut dirinya “Perguruan Islam” atau “Pesantren Modern”.<sup>5</sup> Adapun namanya lembaga pendidikan tersebut itu di dalamnya terdapat madrasah dan pesantren. Melihat keadaan kurikulum tampaknya sistem pendidikan madrasah pada umumnya sama, yaitu sistem klasikal mengajarkan agama disamping pengetahuan umum dengan perbandingan tertentu. Sedangkan sistem pendidikan pesantren diselenggarakan di rumah-rumah kiyai atau di mesjid dengan kitab-kitab tertentu yang biasanya berbeda dengan buku-buku yang terdiri tanpa suatu pengurus, mengatur kurikulumnya sendiri dan pembiayaannya, akan tetapi cenderung sama sistemnya dengan sistem madrasah pada umumnya.

### 3. Tujuan Pendidikan Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan Islam, maka tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, namun dalam hal ini tujuan pendidikan pesantren tidak terlepas dari

---

<sup>5</sup> Abdul Munir, dkk., *Religiusitas Iptek*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 42-43.



tujuan pendidikan Islam itu sendiri untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk :

- a. Mempertinggi mental-mental budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama.
- b. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
- c. Membina/mengembangkan fisik yang kuat dan sehat yaitu jasmani dan rohani.<sup>6</sup>

Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah terdiri dari tujuan umum, tujuan akhir, dan tujuan sementara. Tujuan umum, yaitu tujuan yang meliputi seluruh aspek kemanusiaan yakni sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. Sedangkan tujuan akhir pada hakikatnya merupakan realisasi dari cita-cita ajaran agama Islam itu sendiri yang membawa kesejahteraan umat sebagai hamba Allah lahir dan batin, serta dunia dan akhirat. Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya adalah terdapat pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Begitu juga dengan tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu pendidikan formal.<sup>7</sup>

Pesantren dan sistem pendidikan pesantren yang diterapkan seharusnya mampu meletakkan dasar-dasar atau pola-pola epistemologi yang cocok untuk konteks kekinian. Lebih daripada itu pesantren juga diharapkan mampu memprediksi kebutuhan umat manusia umumnya dan muslim khususnya pada masa-masa mendatang dengan segala kemungkinan. Sebagai realitas empiris bahwa peradaban

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 50.

<sup>7</sup> Zamakhari Dhofier, *op.cit.*, h. 102.

manusia sekarang ini tengah menghadapi cobaan yang amat dahsyat, persisi yang dihadapi di negeri Yunani pada abad ketiga sebelum masehi di semananjung Arabia pada abad ke-VI Masehi dan di Eropa pada abad ke-XV Masehi. Kesamaan yang dimaksud adalah terjadinya degradasi berbagai pola kehidupan yang digunakan manusia dalam meresponi hidup ini.<sup>8</sup>

Diakui atau tidak, peradaban moderen yang di dalamnya manusia hidup sekarang ini tengah berada dalam krisis. Padahal, berbicara tentang peradaban moderen melibatkan pembicaraan tentang sains moderen dan aplikasinya. Hal ini boleh jadi kedengaran berlebihan, tetapi dalam idealitasnya, sains moderen bisa menerangkan berbagai persoalan dunia, tepatnya krisis global masa kini. Hal ini termasuk jelas ketika terjadi aliansi individu, rusaknya lingkungan hidup, degradasi moral politik, ekonomi dan berbagai sektor kehidupan lainnya. Masalah-masalah inilah bersama masalah-masalah lainnya yang saling mempengaruhi dan terakumulasi menjadi krisis global atau multidimensional.<sup>9</sup>

Dalam kondisi seperti itu, umat Islam membutuhkan epistemologi Islam dengan merekonstruksi perangkat ilmu yang ada sekarang ini. Tegasnya, tinjauan tentang terminologi ilmu harus bertitik tolak dari kerangka pedoman utama yaitu, al-Qur'an dan al-Sunnah.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 52.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 59.

#### 4. Tipologi Pondok Pesantren

Pesantren sebagai basis pembentukan epistemologi dan kaedah-kaedah ilmu pengetahuan yang mengarah kepada pembentukan pola pikir dan dzikir. Pembentukan tersebut sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah memang sangat penting untuk menanggulangi krisis multi dimensi. Dalam menjalani dan menghadapi gerak roda pembangunan saat ini, pendidikan nasional dituntut untuk tampil sebagai salah satu unsur terpenting pada pengadaan sumber daya manusia.

Tuntutan tersebut berimplikasi pada perlunya penataan, pengembangan, dan pemanfaatan secara terpadu dengan pendidikan nasional, baik antar jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya, serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif, dan efisien.<sup>10</sup>

Terkait dengan masalah kelembagaan pengajaran, dalam Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, disebutkan bahwa salah satu agenda yang harus dijalankan adalah peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas kelembagaan pengajaran dan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Tap MPR No. II/MPR/1998, *GBHN* (Surabaya: Bina Pustakatama, 1998), h. 126.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 12.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, bahkan merupakan lembaga tertua yang sampai saat ini masih *survive* juga dituntut untuk dapat berperan lebih banyak. Survivenya juga dituntut untuk menarik minat banyak kalangan untuk mempelajarinya, khususnya di kalangan pengamat pendidikan Islam Indonesia. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di berbagai kawasan dunia Islam, tidak banyak lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan. Umumnya lembaga tersebut lenyap setelah tergusur oleh ekspansi sistem pendidikan umum.

Tipologi atau corak watak pesantren secara umum ada dua bentuk yaitu moderen dan tradisional. Namun demikian, juga dapat dikatakan tipologi lain seperti semi tradisional atau semi moderen. Pesantren moderen belum ditemukan secara baku tentang kesepakatan para pakar mengenai kriteria pesantren yang bertipe pesantren moderen. Boleh jadi, pakar yang satu menggolongkan suatu pesantren dalam kategori moderen sementara yang lainnya menggolongkan tradisional, atau semi tradisional, dan atau semi moderen.

### ***B. Peranan Pondok Pesantren dalam Melahirkan Pola Pikir dan Zikir***

Kejatuhan manusia dari mahluk spiritual menjadi mahuk material berawal dari munculnya hurmanisme dalam panggung sejarah ditandai dengan munculnya renaisans, yaitu, kerinduan akan nilai-nilai budaya luhur dari Yunani dan Romawi. Humanisme mempromosikan dirinya dalam artian potensinya melalui corong

renaisans melebihi batas-batas fitrahnya. Humanisme memfigurkan manusia sebagai sentral alam, yang bergerak ke arah pengukuhan manusia sebagai “superman” manusia tanpa segan-segan mengakui dirinya unggul karena penemuan sains dan teknologi lewat otaknya yang berillian. Manusia semakin berambisi untuk menaklukkan alam, karena menganggap alam sebagai objek yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan manusia.<sup>12</sup> Hal ini tampak pada dominasi rasionalisme dan empirisme sebagai pilar utama metode keilmuan dalam penilaian manusia atas realitas.

Eksistensi dan kehadiran pesantren sebagai basis pengembangan perangkat ilmu secara seimbang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan iman dan taqwa (Imtaq). Dalam mencari pola pendidikan yang menyeimbangkan spritual dan material, pesantren sebagai wadah pengembangan SDM harus mampu merekonstruksi kaedah-kaedah ilmu pengetahuan yang seimbang berdasarkan al-Qur'an dan al-sunnah.<sup>13</sup>

Sebagai pengaruh gerakan renaissans, ini melahirkan perintis-perintis pengembangan sains dan teknologi dan filosof Barat moderen, seperti Descartes Bacon Hobbes, dan lain-lain. Masyarakat Barat merasa cukup dengan perangkat sains dan teknologi, sementara pemikiran dan pemahaman keagamaan yang berlandaskan al-Qur'an bukanlah hal yang penting. Descartes misalnya, dianggap sebagai peletak

---

<sup>12</sup> A.M. Saefuddin, *et.al*, *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islami* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1990), h. 158.

<sup>13</sup> Mahdi Gulsyani, *Filsafat Sains Menurut al-Qur'an* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1989), h. 10.

dasar filsafat moderen di saat fajar peradaban Eropa memberikan kepada roh dan jasad sifat-sifat yang saling bertentangan secara mendalam. Ini kemudian dikenal dengan aliran dualisme Descartes.<sup>14</sup> Peradaban Barat cenderung kepada santisme dan mekanisasi, maka konsekuensinya adalah roh disingkirkan. Hasilnya, makhluk yang bernama manusia menjadi robot yang harus diawasi dan dimanipulasi seperti mesin dengan menggunakan kekuatan fisik kimiawi dan berbagai fasilitas teknologi.

Pandangan hidup yang demikian menjunjung tinggi nilai-nilai material sementara nilai-nilai spritual diabaikan. Dalam kehidupan yang demikian, terjadilah desakralisasi. Hilangnya spritualitas dalam karena kesadaran manusia mengantar manusia kepada situasi yang gawat. Akibatnya, yang muncul adalah kompartementalisme dan fragmentalisme dalam kehidupan dan anomi yang gawat, yang terjadi adalah kekacuan dan ketidakseimbangan.<sup>15</sup>

Dalam keadaan sebagai digambarkan di atas, maka pesantren sangat penting, keberadaanya sebagai imbangan terhadap arus globalisasi yang berimplikasi terhadap pola hidup masyarakat. Krisis kemanusiaan yang melanda pertama kali umat manusia berdampak global terhadap beberapa krisis lainnya. Untuk itu, yang pertama kali harus dibenahi atau dimantapkan adalah sisi kemanusiaan pada diri manusia. Dalam hal ini pesantren sangat strategis, dan kenyataanya telah banyak memberi

---

<sup>14</sup> Descartes Bacon Hobbes, *A History of Modern Philosophy* (London: Gorhe Allan and Darwin, 1974), h. 542.

<sup>15</sup> C.A. Qadir, "Philospohy and Science in the Islamic World", Diterjemahkan oleh Hasan Basri dengan Judul *Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam*, Ed. I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), h. 2.

peran dalam memperkenalkan kepada manusia akan tugas pokoknya untuk mengabdikan kepada Allah.

Lebih dari sekedar memperkenalkan, pesantren telah banyak menuntun umat manusia untuk tetap berada pada jalan yang benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat peran para alumni pesantren di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak hanya alumninya, akan tetapi para santri yang masih sedang belajar di pondok pesantren telah banyak menampakkan jati dirinya dalam menuntun umat. Hal ini masih banyak memacu dan memotivasi para orang tua santri untuk memasukkan anaknya di pesantren.

Meskipun pesantren telah banyak memberi peran positif kepada masyarakat, akan tetapi, aspek kemajuan teknologi harus dipikirkan oleh pihak pesantren. Hal ini karena teknologi dan kemajuan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Memang diakui bahwa pesantren masih didominasi oleh pembinaan “pengetahuan keagamaan” pengetahuan “teknis” masih didominasi oleh kalangan sekolah-sekolah teknik. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini pesantren teknologi mulai diadakan oleh sebagian kalangan.

Dari beberapa hasil penelitian mengenai pesantren sebagaimana tersebut di atas, belum ditemukan adanya perhatian khusus dari para peneliti mengenai manajemen pesantren yang digunakan, hal ini bisa disebabkan oleh masalah pesantren seiring dan diidentikkan dengan tradisi-tradisi keagamaan yang menarik, sehingga persoalan-persoalan di luar tradisi-tradisi tersebut dianggap tidak relevan dengan kajian mengenai pesantren. Padahal, persoalan pesantren memang sangat

terkait dengan tradisi-tradisi keagamaan itu merupakan salah satu manajemen yang sangat menarik bagi suatu pesantren.

Hal yang menarik dari gambaran mengenai pesantren-pesantren yang tergolong maju di Sulawesi Selatan, umumnya berlokasi di daerah-daerah yang secara historis justru bukan merupakan daerah-daerah penyebaran agama Islam pertama di Sulawesi Selatan. Menurut Mattulada sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kerajaan yang mula-mula menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan (1605) adalah kerajaan Kembar Makassar yaitu Gowa dan Tallo.<sup>16</sup>

Sebagai daerah yang pernah menjadi tempat penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan, paling tidak, hal tersebut dapat di luar dari segi kemajuan pendidikan Islam di Kabupaten Luwu Utara. Dalam realitasnya, yang terjadi justru sebaliknya, dari 9 buah pesantren dan 25 pesantren madrasah yang ada di Kabupaten Luwu Utara belum ada satu pun yang tergolong besar dan maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan.

Kurang majunya lembaga pendidikan Islam sebenarnya bukan hanya terjadi di Kabupaten Luwu Utara, tetapi hampir di seluruh tanah air. Menurut Ahmad Tafsir, hal tersebut terjadi disebabkan oleh banyak faktor, antara lain oleh faktor dana, dukungan masyarakat Islam, dan oleh pengelolaan sekolah,<sup>17</sup> padahal, di sisi lain kehadiran pesantren itu mengandung arti dan misi yang sangat ideal. Dengan

---

<sup>16</sup> Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.3-4.

<sup>17</sup> Ahmaf Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perpektif Islam* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), h. 3.



demikian, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh pihak pengelola pesantren, yaitu : mengadakan kerja sama yang harmonis dengan pihak pemegang dana dermawan, pemerintah, dan menata dukungan masyarakat secara positif. Di samping itu, diharapkan pihak pesantren mampu mandiri dalam hal dana dan aspek manajerial. Pesantren Balebo sebagai salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Utara, mengalami kendala yang sama, apalagi masih tergolong muda, maka dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan.

Pesantren sebagai wadah penggemblengan generasi muda muslim, berupaya lebih dini sebelum pemikiran umat Islam terkontaminasi oleh pemikiran Barat yang cenderung pada sekulerisasi dan desakralisasi. Pemikiran yang sekuler justru mengantar umat Islam melumpuhkan kesadaran spritual dan melampaui batas-batas fitrah kemanusiaannya.

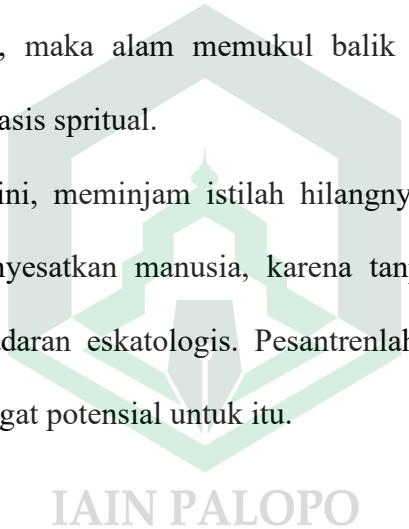
Sekarang, nampak dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi moderen memberi andil yang cukup besar dalam mengantar manusia ke dalam berbagai krisis (*krisis multi dimensional*). Dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi moderen diformulasi dalam ideologi kapitalisme menyebabkan manusia kehilangan kemanusiaannya yang hakiki. Ia kehilangan makna dan tujuan hidup.

Ekosistem dihancurkan oleh persaingan yang kejam, rumah tangga berantakan, adat dan tradisi menjadi rusak, apalagi iman telah menguap dari lubuk hati manusia. Manusia terasing dari lingkungan dan Tuhannya, terjadilah *disharmoni*

dan *diskudibrum* dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain, alam, dan Tuhannya.<sup>18</sup>

Singkatnya, epistemologi yang berkembang sekarang ini adalah epistemologi yang berakar humanisme. Manusia mempromosikan dirinya sebagai *the best actor* dalam panggung sejarah. Manusia hanya menyadari akan eksistensinya dan acuh tak acuh terhadap alam sekitarnya, padahal manusia dan alam sekitarnya adalah dua kutub yang saling menarik dalam siklus kehidupan. Apabila manusia sewenang-wenang terhadap alam, maka alam memukul balik manusia.<sup>19</sup> Oleh karena itu, epistemologi harus berbasis spritual.

Dalam kaitan ini, meminjam istilah hilangnya wawasan yang kudus dari epistemologi akan menyesatkan manusia, karena tanpa arah yang pasti, padahal manusia memiliki kesadaran eskatologis. Pesantrenlah beserta sistem dan muatan pendidikannya yang sangat potensial untuk itu.



### ***C. Pesantren sebagai Wadah Pembentukan Pola Pikir dan Zikir Kaitannya dengan Pembangunan Otonomi Daerah***

Warisan-warisan kolonial Belanda yang dapat kita tonton dan selalu kita lihat dewasa ini adalah tentang sistem pendidikan yang diterapkan di bumi Nusantara ini, Kita tidak menyadari bahwa bentuk dan sistem pendidikan yang diterapkan di

---

<sup>18</sup> Harifuddin Cawidu, *Surprise dan Fenomena Spritualitas Masyarakat Industri (Suatu Telaah terhadap Trend Religiositas di Akhir Abad XX)*, (Makalah IAIN Alauddin, Makassar, 1995), h. 36.

<sup>19</sup> A.M. Saefuddin, et.al., *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islami* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1990), h. 49.

bumi Nusantara ini adalah bentuk dan sistem yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda yang semata-mata berkiblat kebarat-baratan dan bernilai materialistik.

Sejak zaman kolonial pun lembaga pendidikan Islam sudah mulai diterapkan di negeri Republik ini bahkan lembaga pendidikan Islam yang paling banyak berhubungan dengan rakyat dan tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan pesantren sebagai pendidikan *grass root people* yang sangat menyatu dengan kehidupan mereka. Akan tetapi selama masa kolonial, pesantren lepas dari perencanaan pendidikan pemerintah kolonial Belanda, pemerintah Belanda berpendapat bahwa sistem pendidikan Islam sangat jelek baik ditinjau dari segi tujuan, maupun metode dan bahasa (bahasa Arab) yang dipergunakan untuk mengajar, sehingga sangat sulit untuk dimasukkan dalam perencanaan pendidikan umum pemerintah kolonial, tujuan pendidikannya dinilai tidak menyentuh kehidupan duniawi, metode yang digunakan tidak jelas kedudukannya, seorang guru apakah guru atau pemimpin agama, dan dalam bahasa yang dipergunakan, tulisan Arab sangat berbeda dengan bahasa latin yang mulai dari kanan, sehingga menyulitkan untuk dimasukkan ke dalam perencanaan mereka.<sup>20</sup>

Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini hampir semua pesantren telah mengubah dirinya menjadi madrasah, tetapi dengan perubahan menjadi madrasah, maka kerajinan murid diawasi, mata pelajaran berjenjang, kemampuan dan kegiatan

---

<sup>20</sup> Mastuhu, *op.cit.*, h. 60.

murid dinilai oleh kiyai.<sup>21</sup> Semua hal tersebut menggambarkan seluruh jaringan sistem pendidikan pesantren telah berubah tidak hanya menyangkut nilai-nilai yang sifatnya mendasar, tetapi juga nilai-nilai instrumental.

Pada masa kini pesantren sedang berada dalam pergumulan antara “identitas dan keterbukaan”, artinya di satu pihak ia dituntut untuk menemukan identitasnya kembali, di pihak lain ia harus secara terbuka bekerjasama dengan sistem-sistem yang lain di luar dirinya yang tidak selalu sepaham dengan dirinya, kiyai mengalami tantangan-tantangan

1. Ia bukan lagi satu-satunya sumber mencari ilmu dan moral
2. Ia harus bekerja mengatasi kebutuhan ekonomi rumah tangganya
3. Ia harus mengalami krisis kelembagaan pesantren sebagai tempat ideal untuk mencari ilmu dan mengabdikan.<sup>22</sup>

Dalam kaitan tersebut pesantren perlu mengadopsi kultur atau sistem pendidikan nasional dalam hal wawasan berpikir keilmuan, meliputi metode berpikir: deduktif, induktif, kausalitas dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan teknologi dalam struktur relevansinya dengan ajaran agama.

Pengertian pendidikan sesungguhnya merupakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Usaha sadar manusia dewasa.
- b. Kegiatan yang berproses dalam bentuk bimbingan, pengajaran dan atau latihan.

---

<sup>21</sup> H. A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 11.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 149.

c. Ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat secara luas.<sup>23</sup>

Senada dengan point-point tersebut Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa “pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik, menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>24</sup> Komentar yang hampir senada dikemukakan pada oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa “pendidikan adalah usaha ke arah pendewasaan anak agar tercipta sosok yang berkepribadian yang setinggi-tingginya.<sup>25</sup>

Sementara rumusan lain yang nampak lebih luas dikemukakan oleh Hasan Langgulung, ia mengatakan pendidikan dalam artinya yang luas bermakna merubah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Dari berbagai definisi tentang pendidikan yang dikemukakan di atas sebagai referensi berbagai definisi lainnya, dapat dipahami bahwa pendidikan adalah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya jasmani dan rohani. Dalam pada itu, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam formal berusaha ke arah demikian yang dalam tulisan ini diistilahkan pembentukan pola pikir dan dzikir secara utuh.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang RI., *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: 1989), h. 31.

<sup>24</sup> Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), h. 1.

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Ilmu Pendidikan; Suatu Pendekatan Islam* (Jakarta: al-Qushwa, 1993), h. 7.

<sup>26</sup> Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam* (Cet. III; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1985), h. 3.

Pola pikir dan dzikir merupakan dua istilah untuk menyatakan pencapaian manusia secara paripurna. Alasannya, pikir dan dzikir tidak mungkin tercapai apabila tidak diimbangi dengan kesehatan jasmani yang baik. Proses kegiatan yang berlangsung di pesantren merupakan upaya nyata untuk membentuk pola pikir dzikir bagi santrinya.

Dari definisi di atas, dapat diidentifikasi berbagai istilah, misalnya usaha sadar, bimbingan latihan pengajar, kepribadian yang utama, rohani, jasmani, dan lain-lain. Elemen tersebut melibatkan guru dan murid sebagai subjek dan objek pendidikan. Buku materi dan sarana lainnya merupakan, perangkat pendidikan.

Usaha sadar menghendaki adanya orang yang lebih sadar untuk menyadarkan orang lain untuk membangun kesadaran. Bimbingan menjadi sesuatu proses pembentukan pola pikir dan dzikir untuk melahirkan generasi cerdas lahir batin. Latihan merupakan proses praktis untuk melahirkan pola kecerdasan anak didik secara utuh. Pengajaran adalah proses transfer ilmu kepada anak didik dalam rangka kecerdasan intelektual peserta didik.

Kepribadian yang utama adalah sasaran ideal yang harus dicapai setelah proses pendidikan berlangsung. Rohani jasmani merupakan inti dari semua proses pendidikan yang berlangsung di lingkungan formal dan non formal. Dalam rangka melahirkan manusia-manusia SDM paripurna (Imtaq dan Iptek), diperlukan proses pendidikan yang menuju ke arah tersebut. Pola pembinaan di pesantren tidak boleh pincang, dalam artian hanya konsep Islam tanpa penguasaan keterampilan praktis. Keduanya merupakan kebutuhan, primer manusia.

Pada tataran mikro pragmatis, seorang guru yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diukur dengan syarat-syarat untuk menjadi seorang yang baik terkait sifat-sifat guru itu sendiri. Dengan demikian, guru dapat menjadi teladan yang baik. Sifat-sifat tersebut antara lain : (1) Taqwa, (2) Sabar dan rela berkorban, (3) Percaya dan suka kepada murid-muridnya, (4) Adil, (5) Mempunyai gezaq, (6) Penggembira, (7) Menguasai materi ajar, (8) Suka kepada pelajaran yang diberikannya serta (9) Berpengetahuan luas.<sup>27</sup>

Penulis menambahkan syarat lain yang mengakomodir sifat-sifat di atas, yaitu memiliki sifat-sifat kenabian kecuali sifat-sifat tidak mungkin atau khusus untuk Nabi. Pernyataan ini didukung oleh suatu statemen dari Robert L. Gullick Jr. dalam bukunya Muhammad *The Educator* yang dikutip oleh Maghfur Wahid dalam sebuah tulisannya bahwa Muhammad merupakan seorang pendidik yang membimbing manusia menuju kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar. Tidak dapat dibantah lagi bahwa Muhammad telah melahirkan ketertiban dan stabilitas yang mendorong perkembangan Islam, suatu revolusi sejati yang memiliki tempo yang tidak tertandingi dan gairah yang menantang. Hanya konsep pendidikan yang paling dangkallah yang berani menolak keabsahan meletakkan Muhammad di antara pendidik besar di dunia sepanjang masa, karena dari sudut pragmatis seorang yang mengangkat prilaku manusia adalah seorang pangeran di antara pendidik.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 176.

<sup>28</sup> Maghfur Wahid, *Syariat Islam dalam Kebijakan Pendidikan Islam*, (Makalah UNM, 2003), h. 3.

Sistem pendidikan bagaimanapun dan lembaga pendidikan apapun namanya, mencontoh sistem pendidikan Rasulullah saw adalah hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Karena dalam diri Rasulullah contoh yang baik. Secara teknis operasional berbeda, tetapi prinsip dan tujuan pendidikan Rasulullah saw adalah tokoh dan figur sentral.

Dengan demikian, guru adalah pewaris Rasulullah dalam merubah dan membentuk pola pikir dan dzikir peserta didik. Guru yang baik bukanlah guru yang tahu semua jawaban, melainkan mampu mengarahkan si terdidik untuk mencari dan menemukan jawaban itu. Hal yang terpenting sebagai kata kunci adalah pendidik di pesantren haruslah menjadi teladan bagi santrinya setiap saat. Kedekatan murid kepada gurunya (*ustazdnya*) adalah jalan yang paling efektif untuk mengambil keteladanan dari gurunya.

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah diyakini oleh pendiri Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi dapat dipahami dari pernyataan Yamin bahwa :

“Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa, dan di daerah, dengan keadaan yang demikian, maka tiap-tiap bagian atau golongan rakyat mendapat otonomi (membuat dan menjalankan peraturan-peraturan sendiri) dan zelfbestuur (menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi). Keadaan yang seperti itu penting sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu negeri tidak sama, melainkan berlain-lain”.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Jambatan, 1960), h. 168.



Dari apa yang dikemukakan Hatta menjadi jelas bahwa prinsip otonomi harus menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis agar ada jaminan kebebasan bagi warganya untuk menyalurkan aspirasi politik. Karena otonomi daerah merupakan pancaran diterapkannya asas desentralisasi, maka pada hakekatnya asas desentralisasi inilah yang mendasari terwujudnya demokrasi. Dalam aspek hubungannya dengan demokrasi, desentralisasi sebagai syarat demokrasi karena Konstitusi disusun dalam kerangka Negara Kesatuan harus tercermin kepentingan daerah, melalui aturan pembagian kekuasaan antara badan-badan pusat dan badan-badan daerah secara adil dan bijaksana sehingga daerah memelihara kepentingannya dalam kerangka Negara Kesatuan. Susunan yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan di tingkat pusat dan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah.

Di sinilah diketengahkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang dapat membendung arus sentralisasi. Bagir Manan dalam konteks ini mengatakan bahwa ada tiga faktor yang menunjukkan kaitan erat antara demokrasi dan otonomi daerah : *pertama*, untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*) *kedua*, untuk membiasakan rakyat berupaya untuk mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan dirinya; *ketiga*, untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan dan kebutuhan beragam. Meskipun begitu memang tidak dapat di pungkiri begitu saja kenyataan bahwa di Negara yang menganut sistem sentralisasi pun mungkin dapat tumbuh demokrasi,

namun adanya otonomi daerah dan desentralisasi akan jauh lebih menjamin tumbuhnya demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.<sup>30</sup>

Di atas telah di jelaskan mengenai otonomi daerah sebagai proses demokrasi namun bagaimana dengan integrasi di Negara Indonesia bukankah Indonesia adalah Negara yang majemuk sedangkan dengan adanya demokrasi bisa dikatakan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap kemajemukan tersebut artinya terdapat kesempatan yang sama serta kebebasan yang seluas-luasnya bagi semua kepentingan untuk masuk terkhusus kepentingan primordial bukankah dengan adanya hal tersebut telah adanya disintegrasi akan semakin lebar. Setiap Negara Kebangsaan memerlukan demokrasi dan integrasi sekaligus, padahal keduanya memiliki watak yang bertentangan.

Demokrasi diperlukan agar setiap kelompok bisa secara bebas memperjuangkan aspirasinya melalui persaingan yang bebas pula, namun di saat yang sama integrasi diperlukan agar kedaulatan negara senantiasa utuh (integrasi). Karena watak masing-masing yang berbeda-beda maka kerap kali negara baru dihadapkan pada pilihan yang dilemmatis jika ingin demokrasi tinggalkan pemikiran integrasi, sebaliknya jika menginginkan integrasi merupakan pemikiran tentang demokrasi. Mengapa begitu dilemmatis? Karena jika demokrasi yang akan dibangun berarti harus membuka kebebasan dan otonomi kelompok-kelompok primordial di dalam

---

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Cet. I; Yogyakarta: PSH FH-UII, 2001), h. 17-18.

masyarakat harus dikekang sedemikian rupa agar tidak terjadi perpecahan. Jika tampak ada ironi.<sup>31</sup>

Upaya integrasi bangsa biasanya menghadapi dilemma karena setiap proses penciptaan satu negara kebangsaan yang berdaulat semakin meningkatkan sentimen primordial. Ini disebabkan oleh karena negara-negara baru kerap kali membawa hal-hal baru yang dapat diperebutkan oleh berbagai kelompok primordial. Maka harus dipahami bahwa setiap negara baru memerlukan kewaspadaan atas timbulnya masalah SARA sebab ketidakpuasan primordial biasanya membawa akibat pada timbulnya tuntutan untuk merumuskan kembali kedaulatan negara dan bangsa. Dan ancaman disintegrasi ini bukan hanya korban atas satu rezim, tetapi juga bangsa. Itulah penjelasan tentang dilema antara demokrasi dan integrasi yang kelihatannya harus dipilih satu karena di antara keduanya tidak dapat dibangun secara bersamaan. Tetapi sebenarnya dilema antara demokrasi dan integrasi itu bukan sesuatu yang mutlak harus dihadapi oleh setiap Negara.<sup>32</sup>

Di sini sebenarnya merupakan seruan agar setiap negara dapat mengatur dirinya sedemikian rupa agar pemenuhan tuntutan integrasi dan demokrasi itu dapat terpenuhi secara serasi, bukan harus dipenuhi salah satu. Pada akhirnya dari berbagai uraian dan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan otonomi daerah di Indonesia merupakan proses menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 66.

<sup>32</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: Rajawali, Pers, 1991), h. 14.

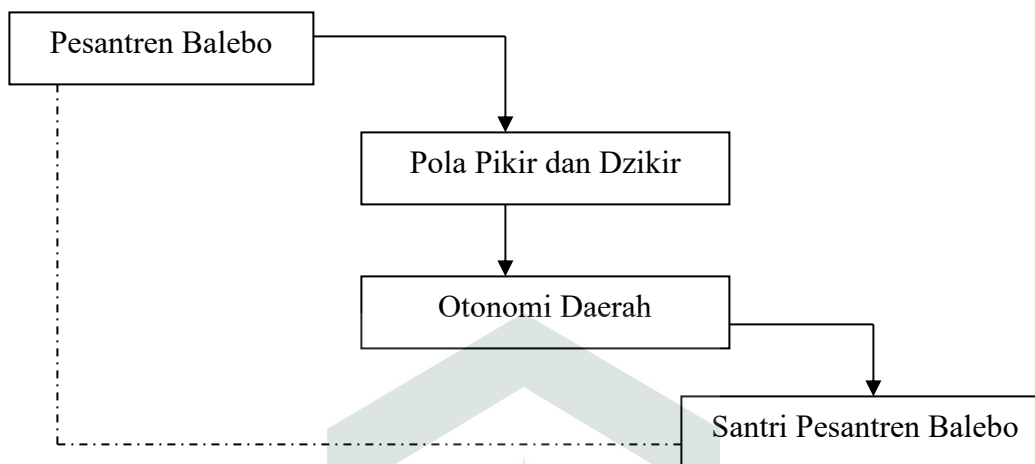
sesuai dengan amanat Konstitusi. Adanya otonomi daerah merupakan sebuah toleransi pemerintah pusat terhadap daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya. Aspek demokrasi yang dimaksud di sini adalah adanya optimalisasi peran serta masyarakat di daerah dalam membangun atau mengurus daerahnya sesuai dengan prakarsa dan kreativitas masyarakat tanpa semuanya harus diurus oleh pusat.

Karena kecendrungan yang terjadi ketika semua harus tersentralisasi di pusat maka konsekwensinya adalah adanya keseragaman dan menafikkan keberagaman yang terjadi di daerah. Namun perlu menjadi perhatian pula bagi negara untuk selalu menempatkan integrasi berdampingan dengan demokrasi artinya tidak selayaknya negara hanya menitik tekankan pada demokrasi saja atau sebaliknya pada integrasi saja. Keduanya harus berjalan seiringan.

#### ***D. Kerangka Pikir***

Dengan dipahaminya bahwa Pesantren adalah lembaga pendidikan yang berasrama untuk mempelajari agama Islam, serta kadang-kadang lembaga seperti ini mencakup ruang lingkup yang luas sekali dan mata pelajaran yang diberikan dapat meliputi tafsir, hadist, ilmu kalam, fiqhi, tauhid dan tasawuf, namun demikian tidaklah pesantren hanya memberikan pelajaran agama semata, tetapi juga memberikan mata pelajaran umum di dalam kelas. Sehingga menghasilkan luaran siswa yang di samping bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, juga lebih mengembangkan pendidikan secara profesional dalam mata pelajaran umum.

Untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang alur pengembangan skripsi ini, maka secara diagram digambarkan sebagai berikut :



Dari gambar tersebut di atas dijelaskan bahwa penggabungan program pendidikan yang diselenggarakan di Pesantren Balebo bukan hanya memberikan pendidikan agama Islam semata, akan tetapi juga menyajikan materi pelajaran yang bersifat umum, di mana mampu mengikuti arus perkembangan yang bersifat umum, sehingga dengan keseluruhan materi pelajaran yang ada disamping IPTEK juga IMTAQ, akan melahirkan santri yang berdaya saing tinggi beriman dan bertaqwa dan juga berilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan arus modernisasi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, atau penelitian yang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini difokuskan pada pencarian data-data dan informasi melalui daftar wawancara dan penyebaran daftar pertanyaan kepada seluruh objek penelitian, yakni kepada beberapa orang guru serta siswa yang ada pesantren Balebo kabupaten Luwu Utara.

#### ***B. Instrumen Penelitian***

Peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Moleong bahwa dalam penelitian *kualitatif* peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain yang menjadi pengumpul data utama.<sup>2</sup> Dalam kaitan ini, manusia dapat berhubungan langsung dengan responden atau objek penelitian lain. Dalam pada itu, peneliti berperan sebagai instrumen dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara (*interview guide*).

---

<sup>1</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 105-106.

<sup>2</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rineka Cipta, 1990), h. 19.

Peneliti dapat mengerti mengenai realitas yang ditemukan di lapangan. Meskipun peneliti sebagai instrumen utama penelitian ini, tetapi peneliti tetap mempertimbangkan aspek-aspek penting, yaitu : 1). orientasi objektivitas ataukah orientasi subjektif, 2). mengacu pada tujuan penelitian terikat pada kode etik penelitian, dan 3). orientasi pada kebenaran dan aspek ilmiah. Selain peneliti, digunakan pula item-item pertanyaan atau angket untuk mendapatkan informasi dan penyesuaian informasi guru-guru dan santri.

Adapun dalam mencari informasi dengan melalui wawancara, maka peneliti menggunakan pedoman (*interview guide*).

Instrumen lainnya adalah alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat respon informasi tentang pertanyaan yang diajukan. Singkatnya. instrumen penelitian dalam hal ini adalah semua perangkat termasuk peneliti sendiri beserta perangkat lainnya yang digunakan untuk mencari dan menemukan informasi untuk dijadikan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Selain informasi tersebut, peneliti menelusuri informasi tentang sistem pembinaan santri. Ini dilakukan cara mencari informasi melalui pengamatan langsung di kelas dan di luar kelas selama benda dalam lingkungan pondok pesantren.

Untuk mengamati peluang dan tantangan pesantren ini pada era pembangunan otonomi daerah, maka kurikulum dan sistem pembinaan santri ini dilakukan dengan cara observasi langsung baik dalam proses belajar mengajar di kelas maupun interaksi di luar kelas. Akan tetapi, pencarian data sejenis ini diperkenalkan melalui *interview* (wawancara).

### ***C. Populasi dan Sampel***

#### **1. Populasi**

Populasi adalah semua anggota sekelompok orang atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Hal ini diperjelas oleh Arikunto bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka ditetapkan populasi penelitian ini yaitu, keseluruhan guru dan siswa pesantren Balebo yang berjumlah 61 siswa, dan guru atau tenaga pengajar berjumlah 17 orang.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>4</sup> Untuk menentukan besarnya sampel dari setiap kelas digunakan sampel berimbang yaitu pengambilan sampel pertimbangan besar kecilnya sub populasi.<sup>5</sup> Sedangkan untuk menggunakan subyek dari populasi yang akan dijadikan sampel penelitian digunakan *total sampling*. Yang dimaksud dengan *total sampling* adalah jika di dalam pengambilan sampelnya peneliti mengambil semua subyek di dalam populasi, sehingga semua subyek dalam populasi dianggap sama dan peneliti memberi hak yang sama pada setiap subyek untuk menjadi sampel. Jumlah keseluruhan sampel yang diteliti dalam penelitian ini sebanyak 61 orang santri / siswa.

Ukuran sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan besaran sampel, yaitu:

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 108.

<sup>4</sup> S. Margono, *op.cit.*, h. 121.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 11.



Rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasinya.

N : Jumlah frekuensi banyaknya individu.

P : Angka persentase.<sup>6</sup>

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menempuh teknik observasi, dokumentasi, wawancara dan angket.

##### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap proses belajar mengajar di kelas. Selain itu, dilakukan pula pengamatan mengenai pola pembinaan santri terhadap kebiasaan belajar di luar kelas, serta pembinaan akhlak (pencerahan kalbu).

##### 2. Dokumentasi

Dokumen adalah semua bahan yang tertulis yang telah dipersiapkan guna memenuhi permintaan seseorang penyidik atau peneliti.<sup>7</sup> Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk melengkapi data dan berbagai lampiran dalam tulisan ini. Di samping

---

<sup>6</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 40.

<sup>7</sup> Lexy Moleong, *op.cit.*, h. 62.

itu, dokumentasi ini penting sebagai sumber informasi untuk diinterpretasi, misalnya, kurikulum yang digunakan apakah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan santri sebelum memasuki pesantren tersebut atau tidak? apakah kurikulum yang dianggap “mapan” itu diterapkan atau tidak? semuanya dibuktikan dengan memperhatikan jenis materi dan buku-buku pelajaran yang diajarkan.

### 3. Wawancara

Salah satu teknik yang digunakan dalam rangka memperoleh data adalah teknik wawancara. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara atau peneliti menggunakan alat bantu berupa item-item pertanyaan (pedoman wawancara).<sup>8</sup> Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada *informant*, pewawancara memperhatikan dan menulis pada buku catatan yang telah disiapkan sebelumnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan pondok pesantren dan dua guru pembina lainnya dalam melakukan wawancara ini, pewawancara senantiasa mengacu kepada pedoman wawancara, meskipun tidak berarti tidak boleh dikembangkan bila tiba-tiba ada hal-hal yang dianggap penting. Akan tetapi, hal-hal yang dianggap penting itu harus ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.

Tegasnya, bahwa informasi yang dicari dalam teknik ini adalah tentang poles-oles pembinaan kecerdasan intelektual santri dan pembinaan akhlaknya. Hal ini penting dilakukan untuk memprediksi peluang dan tantangan luaran pondok pesantren tersebut kini dan yang akan datang.

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 137.

### ***E. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan upaya mencari, mengidentifikasi dan mensistematisasi catatan dari hasil observasi langsung, dokumentasi dan jawaban dari angket. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan sebagai informasi bagi orang lain.<sup>9</sup>

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi : a). penyajian data yang sudah terkumpul, b). analisis data dalam bentuk reduksi, dan c). penarikan kesimpulan. Dalam penelitian, reduksi data merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk menjawab masalah dengan tepat sasaran.

Dalam kaitan ini, reduksi data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data terhadap materi yang diajarkan dan kesesuaian tidaknya dengan kurikulum yang ada, baik lokal maupun dari departemen lain kalau ada.
2. Reduksi terhadap hasil wawancara, dengan cara membuat catatan tentang data dari aktivitas wawancara yang teratur agar dapat dipahami oleh pembaca.

Setelah mereduksi dan menganalisis data, maka penulis merumuskan kesimpulan yang diulas melalui uraian yang terstruktur. Di samping itu, data hasil penelitian disajikan dengan mengadakan perbandingan variabel-variabel untuk memastikan apakah ada kesesuaian isi (*content*) yang mengacu kepada tujuan penelitian. Analisis isi (*content analysis*) dilakukan dengan tetap mengacu kepada kriteria penelitian yang didasarkan pada orientasi *maddah* atau materi yang disajikan.

---

<sup>9</sup> Noeng Muhadjir, *op.cit.*, h. 104

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Deskripsi Hasil Penelitian***

##### **1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian**

Pesantren Balebo yang berdiri sejak tahun 1984 ini adalah merupakan salah satu pesantren yang ada di sebelah barat kota Masamba tepatnya di Jl. Balebo, desa Balebo, kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara, merupakan salah satu daerah yang masih tergolong baru tersentuh pola pembangunan pemerintah dalam segala hal, baik secara fisik maupun non fisik.

Abd. Halim, S.Pd., selaku kepala pesantren, bahwa Pesantren Balebo sebagai instansi yang juga berada naungan pemerintah kabupaten Luwu Utara, untuk itu perlu juga mendapat perhatian yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya dengan memberikan pembinaan, bantuan, bimbingan yang positif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Pesantren Balebo berdiri atas inisiatif bersama antara pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama serta didukung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah tersebut. Hal ini didorong oleh animo masyarakat yang tinggi serta menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga berkat

---

<sup>1</sup> Abd. Halim, Kepala Pesantren Balebo, *Wawancara*, Balebo, Oktober 2010.

dukungan dari semua pihak, maka Pesantren Balebo ini dapat berdiri sampai sekarang ini.

Selanjutnya menurut Rasman, S.Ag., sebagai salah satu tenaga pengajar di Pesantren Balebo, bahwa visi dan misi Pesantren adalah suatu hal yang mutlak untuk dicapai guna memberi hasil yang optimal, adapun visi dan misi pesantren Balebo, adalah Visi ; Mewujudkan Madrasah yang utuh dalam Imtaq, unggul dalam Iptek dan berprestasi serta siap dalam menghadapi persaingan global, dan Misi : (a) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, (b) Menumbuh kembangkan semangat keunggulan dan bernalar sehat kepada para peserta didik, guru dan karyawan sehingga berkemauan kuat untuk bisa maju, (c) Meningkatkan komitmen seluruh tenaga kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya, dan (d) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan administrasi Madrasah.<sup>2</sup>

Itulah sekilas sejarah singkat berdirinya Pesantren Balebo, yang penulis ketengahkan tersebut agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan di dalam usaha untuk lebih mengetahui dengan jelas berdirinya Pesantren Balebo Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.

## 2. Kondisi Siswa

Sejak pertama dibuka, Pesantren Balebo telah menerima serangkaian siswa dan siswi yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, dan tentunya

---

<sup>2</sup> Rasman, Guru Pesantren Balebo, *Wawancara*, Balebo, Oktober 2010.

mempunyai keinginan yang sama yakni menimba ilmu di Pesantren Balebo yang kita ketahui mempunyai visi dan misi yang tentunya sangat membanggakan.

Untuk dapat melihat hasil-hasil objektif dari hasil pemaparan penelitian ini maka terlebih dahulu penulis akan memberi gambaran tentang kondisi objektif dari siswa-siswi Pesantren Balebo itu sendiri baik yang masuk kategori sampel atau keseluruhan dari populasi yang akan diteliti, dan hal tersebut dapat digambarkan dengan tabel berikut :

**Tabel 1**

Kondisi Keseluruhan Siswa Pesantren Balebo Tahun Ajaran 2010/2011

No	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kelas I	11	2	13
2.	Kelas II	16	1	17
3.	Kelas III	19	12	31
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>15</b>	<b>61</b>

Sumber Data : Pesantren Balebo Tahun Ajaran 2010/2011

Melihat kondisi keseluruhan siswa yang ada saat ini di Pesantren Balebo, maka dapat diperkirakan bahwa dengan begitu banyaknya karakter siswa yang mempunyai ciri dan watak individu berbeda satu sama lain, maka tentunya akan membutuhkan kreativitas seorang pengajar/pendidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang pengajar untuk membentuk karakter yang berbeda tersebut sesuai dengan visi dan misi dari Pesantren Balebo itu sendiri.

## 2. Kondisi Guru

Untuk mendukung suatu program pendidikan dengan baik dalam suatu lembaga pendidikan sangat tergantung dari keadaan guru dan siswanya, karena mustahil program pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik jika salah satu diantaranya tidak ada. Karena itu kedua unsur (guru dan siswa) tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam proses belajar mengajar, khususnya di sekolah sebagai lembaga formal.

**Tabel 2**

Keadaan Guru Pesantren Balebo Tahun Ajaran 2010/2011

No	Nama Guru	Jenis Kelamin	Jabatan	Ket.
1.	Abd. Halim, S.Pd.	L	Kepala Pesantren	
2.	Rasman, S.Ag.,	L	Guru Kelas	
3.	Dra. Nurpa	P	Guru Kelas	
4.	Rasman SS., S.Pd.	L	Guru Kelas	
5.	St. Hajrah, S.Pd.	P	Guru Kelas	
6.	Sihar, S.Ag.	P	Guru Kelas	
7.	Said, S.Ag., S.Pd.	P	Guru Kelas	
8.	Sahrah, S.Pd.	P	Guru Kelas	
9.	Ahisar	P	Guru Kelas	
10.	Agusrin	P	Guru Kelas	
11.	Marhaeni, S.Pd.I.	P	Guru Kelas	
12.	Rosdiana, S.Pd.	P	Guru Kelas	
13.	Nursaid, S.Ag.	L	Guru Kelas	
14.	Mukhladin, A.Ma.	L	Guru Kelas	
15.	Sarman, SE.	L	Guru Kelas	
16.	Rusmiati, S.Ag.	P	Guru Kelas	
17.	Sahriati, S.Pd.	P	Guru Kelas	

Sumber Data : Pesantren Balebo Tahun Ajaran 2010/2011

Melihat keseluruhan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pesantren Balebo tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa segala potensi yang ada

dimiliki memang bila dikondisikan dengan kondisi siswa yang ada maka memang masih sangat jauh dari efektivitas yang diinginkan, akan tetapi hal tersebut tidak mempuat para pengajar yang ada menjadi putus asa, akan tetapi malah hal itu membuat segalanya menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik di Pesantren Balebo.

Dengan demikian, pendidik (guru) dalam pendidikan Islam memiliki arti dan peranan yang sangat penting karena ia memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah pendidikan. Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun potensi psikomotoriknya.

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat memperlancar proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran yang tersedia dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran secara efisien dan efektif. Apalagi dewasa ini kita senantiasa dituntut untuk menggunakan fasilitas mengajar yang memadai, karena situasi dan kondisi yang semakin modern akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



**Tabel 3**

Sarana dan Prasarana Pesantren Balebo Tahun Ajaran 2010/2011

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kepala pesantren	1	Baik
2.	Ruang Guru	1	Baik
3.	Ruang Kelas	6	Baik
4.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
5.	Meja Guru	7	Baik
6.	Kursi Guru	7	Baik
7.	Meja Siswa	100	Baik
8.	Kursi Siswa	100	Baik
9.	Lemari Buku	6	Baik
10.	Rak Buku	1	Baik
11.	Papan Tulis	6	Baik
12.	Papan Absen	6	Baik
13.	WC	1	Baik
14.	Mushollah	1	Baik

Sumber Data : Pesantren Balebo Tahun Ajaran 2010/2011

Berdasarkan keterangan tabel di atas, nampaklah bahwa Pesantren Balebo sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah hampir cukup memadai sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat yang ada disekitarnya, walaupun sebenarnya masih perlu untuk diadakan penambahan dan pembenahan yang bersifat relatif dari segi fasilitas dan peralatan dalam proses belajar mengajar.

## ***B. Pondok Pesantren dalam Menghadapi Pembangunan Otonomi Daerah***

Pesantren adalah salah satu wadah/lembaga pendidikan Islam yang berkonotasi tradisional, pada umumnya berlokasi di daerah terpencil. Namun dewasa ini tidaklah berarti ia tertutup dari segala inovatif. Sejalan dengan itu pula adanya perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diiringi pula dengan adanya perubahan sosial yang semakin cepat serta munculnya berbagai tantangan dan hambatan, maka sudah barang tentu dunia pendidikan perlu membenahi diri untuk menghadapi berbagai hal itu.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sangat berperan penting, terutama dalam mempersiapkan tenaga-tenaga yang memiliki ilmu pengetahuan umum yang memadai serta ilmu pengetahuan agama yang cukup serta dapat membentuk manusia yang berkepribadian kokoh dan kuat dengan penuh jiwa pengabdian, baik terhadap agama maupun bangsa dan negara.

Perlu disadari bahwa tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang jauh lebih berat dan sulit bila dibandingkan dengan apa yang dihadapi pada masa sekarang. Oleh karena itu para pengelola lembaga pendidikan pondok pesantren dituntut untuk sanggup mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri, sebagaimana telah diamanahkan dalam UU. RI. No. 20 tahun 2003, bab II pasal 4, yaitu:

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, adalah manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani,

berkepribadian mantap, serta mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>3</sup>

Di samping telah dirumuskan dalam UU. RI. No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tersebut, Islam dalam hal ini untuk membina moral kepribadian generasi pelanjut, memberikan rumusan tujuan pendidikannya. Supaya membentuk manusia sehat, cerdas, patuh dan tunduk, kepada perintah Allah Swt serta menjauhi larangan-laranganNya, sehingga ia dapat berbahagia hidupnya lahir bathin, dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

Manusia sebagai khalifah Allah yang hidup di muka bumi ini mereka harus memahami hakikat hidup serta tanggung jawabnya sebagai khalifah, tanggungjawab yang paling utama adalah masalah pembinaan terhadap generasi muda sebagai generasi pelanjut, dengan pembinaan yang diberikan oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa maka kehidupan dunia akhirat terhindar dari kerusakan dan malapetaka karena ditunjang oleh moral kepribadian yang telah dibina dengan nilai-nilai pendidikan.

Melihat semakin kompleksnya masalah pendidikan dan adanya tuntutan perkembangan dunia modern yang ditandai dengan kehidupan sosial masyarakat yang semakin global, maka lembaga pendidikan dalam hal ini adalah pondok pesantren Balebo di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara perlu membenahi diri agar

---

<sup>3</sup> Yusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 15.

<sup>4</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 99.

mampu mewujudkan tujuan pendidikan serta dapat menjawab tantangan dan tuntutan dunia modern.

Berdasarkan hal tersebut guna mempersiapkan segala daya dan upaya yang akan dipersiapkan di pesantren, tentunya peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, atau pemerataan tidak harus dimulai dari titik nol karena proses pendidikan sudah berjalan sejak lama. Perubahan atau pembaharuan yang bertitik tolak dari kenyataan yang ada relatif murah dan tidak akan menimbulkan gejolak sosial karena komponen-komponen yang mengalami perubahan secara logis dan jelas merupakan pertumbuhan atau perkembangan dari suatu batang tubuh yang sudah ada. Begitu pula halnya, pembaharuan yang akan kita lakukan adalah suatu perkembangan, pertumbuhan, atau kelanjutan dari sesuatu yang sudah kita miliki sejak lama.

Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Efisiensi yaitu apakah cara belajar yang diterapkan di pesantren lebih efisien dan efektif, jadi pesantren harus banyak introspeksi diri.
2. Progresif, orientasi dari pendidikan dan pengajaran hendaknya mengacu pada masa depan.
3. Homogenising, artinya dari yang satu menjurus pada seluruh sektor kehidupan, dalam hal ini tidak hanya melahirkan siswa atau santri sebagai petani, misalnya. Namun ia juga bisa melahirkan pedagang, pemimpin negara dan seharusnya melahirkan manusia yang mampu menjadi penghubung dalam setiap sektor yang karenanya mampu menjadi pemimpin yang baik.

4. Irrenvesible, artinya gerakannya harus gerakan maju bukan gerakan mundur. Maka banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pesantren, selain mengantisipasi kondisi yang ada dan yang akan datang, juga harus mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam cara modern ini.<sup>5</sup>

Dari hal tersebut di atas apabila pihak pengelola pondok pesantren dan guru yang ada didalamnya menerapkan/mensosialisasikan dalam kehidupan pondok pesantren atau dalam proses belajar mengajar maka secara tidak langsung pondok pesantren akan melakukan perubahan menuju langkah maju.

Adapun Pesantren Balebo kaitannya dengan pembangunan otonomi daerah, seperti dijelaskan Abd. Halim, S.Pd., selaku penanggung jawab Pesantren, bahwa sebagai salah satu pondok Pesantren yang bergerak dalam bidang pengelolaan pendidikan dan akhlak siswa, masih terbilang kurang dalam kepemilikan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung proses pembelajaran yang berlangsung di Pesantren.<sup>6</sup>

Selanjutnya dijelaskan oleh ibu St. Hajrah, S.Pd ada beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pesantren dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam proses pembelajaran, yakni Pesantren sangat berpeluang untuk mengembangkan diri dalam hal pengembangan sistem pembelajaran atau kurikulum yang memang masih berdasarkan apa yang menjadi panduan yang ada di dalam materi atau bahan ajar bagi guru, kemudian hambatannya dalam kaitannya dengan

---

<sup>5</sup> Abdul Munir, *Religiusitas Iptek*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 42-43.

<sup>6</sup> Abd. Halim, Kepala Pesantren, *Wawancara*, Balebo, April Oktober 2010.

peningkatan mutu dan kualitas luaran Pesantren yang optimal, masih terbentur dari pola pembelajaran yang bersifat monoton yang dilakukan oleh sang guru.<sup>7</sup>

Sistem madrasah dan pesantren termasuk salah satu organisasi yang tunduk pada sistem sosial dan budaya lingkungannya, yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat serta mendapat pengakuan dan dukungan. Jadi fungsi-fungsi madrasah dan pesantren diselenggarakan menurut norma-norma dan aturan masyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, maka tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Namun dalam hal ini tujuan pendidikan pesantren tidak terlepas dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk :

- a). Mempertinggi mental-mental budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama.
- b). Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
- c). Membina/mengembangkan fisik yang kuat dan sehat yaitu jasmani dan rohani.

Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah terdiri dari tujuan umum, tujuan akhir, dan tujuan sementara. Tujuan umum, yaitu tujuan yang meliputi seluruh aspek kemanusiaan yakni sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. Sedangkan tujuan akhir pada hakikatnya merupakan realisasi dari cita-cita ajaran agama Islam itu sendiri yang membawa kesejahteraan umat sebagai hamba Allah lahir dan batin, serta dunia dan akhirat. Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya adalah terdapat pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Begitu juga dengan tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah

---

<sup>7</sup> St. Hajrah, Guru Kelas Pesantren Balebo, *Wawancara*, Balebo, Oktober 2010.

anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu pendidikan formal.

### ***C. Tipologi Pesantren untuk Mendukung Otonomi Daerah***

Tipologi pendidikan adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan organisasi yang bersangkutan. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu dan kualitas pendidikan yaitu : 1). Kebijakan dan pendidikan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* atau input-input analisis yang tidak konsisten; 2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; 3) peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.<sup>8</sup>

Berdasarkan penyebab tersebut dan dengan adanya era otonomi daerah yang sedang berjalan maka kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk mengembangkan SDM adalah : (a) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (*school based management*) di mana sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan; (b) Pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi komunitas (*community based*

---

<sup>8</sup> S.P., Sianipar, *Perencanaan Peningkatan Kinerja*, (Bahan Diklat Spoma), (Jakarta: LAN, 1989), h. 39.

*education*) di mana terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai *community learning center*; dan (c) Dengan menggunakan paradigma belajar atau *learning paradigma* yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau *learner* menjadi manusia yang diberdayakan.<sup>9</sup>

Selain itu pada tanggal 2 Mei, bertepatan hari pendidikan nasional, pemerintah telah mengumumkan suatu gerakan nasional untuk peningkatan mutu pendidikan, sekaligus menghantar perluasan pendekatan *Broad Base Education System (BBES)* yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera.<sup>10</sup>

Dengan pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan mendapatkan pembekalan *life skills* yang berisi pemahaman yang luas dan mendalam tentang dukungan dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan sekitarnya dapat memperoleh masukan baru dari insan yang mencintainya, dan lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang mengantarkan manusia yang mencintainya menikmati kesejahteraan dunia akhirat.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa peranan pondok Pesantren memiliki prinsip yang paling mendasar dalam pengelolaan pembangunan, di samping pembangunan nasional secara umum juga tidak terlepas dari

---

<sup>9</sup> Depdiknas, *Panduan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Depdikbud, 1999), h. 55.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 44.



pembangunan otonomi daerah, atau yang dicanangkan dalam peningkatan mutu sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu harus dilaksanakan di pondok Pesantren.
2. Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik dalam suatu institusi.
3. Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
4. Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di pondok Pesantren.
5. Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa Pesantren dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua dan masyarakat. (*hand out*, pelatihan calon kepala Pesantren).<sup>12</sup>

Adapun penyusunan program peningkatan mutu dengan mengaplikasikan empat teknik : a) *school review*, b) *benchmarking*, c) *quality assurance*, dan d) *quality control*. Berdasarkan “*Panduan Manajemen Sekolah*” dijelaskan sebagai berikut :

*a. School review*

Suatu proses di mana seluruh komponen Pesantren bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional (ahli) untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas Pesantren, serta mutu lulusan. *School review* akan menghasilkan rumusan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 25.

tentang kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan dan prestasi siswa, serta rekomendasi untuk pengembangan program tahun mendatang.

*b. Benchmarking*

Suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. *Benchmarking* dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok ataupun lembaga.

*c. Quality assurance*

Suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Dengan teknik ini akan dapat dideteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada proses. Teknik menekankan pada monitoring yang berkesinambungan, dan melembaga, menjadi subsistem Pesantren.

*d. Quality control*

Suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. *Quality control* memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti, sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dengan berlandaskan hal tersebut jika dikaitkan dengan pembangunan otonomi daerah, dengan melihat pengalaman masa lalu, bahwa sejak pertama Negara Indonesia berdiri sampai bergulirnya reformasi, sudah ada kebijakan desentralisasi namun pada kenyataannya belum berjalan maksimal ada kemungkinan terjadinya hal

tersebut karena corak pemerintahan yang dibangun oleh penguasa saat itu lebih sentralistik selain itu belum ada pemahaman yang jelas mengenai konsep desentralisasi yang sebenarnya. Sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam hubungan pusat dan daerah. Ada kesan Otonomi daerah “dikebiri” dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan keyakinan baru bagi masyarakat di daerah bahwa pusat bukan hanya mengeksploitatif mereka, tetapi juga mengambil hak mereka untuk mendapat pelayanan yang baik oleh sebuah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berlangsung sangat lama, sehingga menimbulkan berbagai ketidakpuasan.

Dengan demikian secara substansial dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind* (tugas pembantuan). Otonomi daerah sebagai realisasi dari sistem desentralisasi bukan hanya merupakan pemencaran wewenang atau penyerahan urusan pemerintahan, namun juga berarti pembagian kekuasaan (*division of power*) untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara dalam hubungan pusat daerah. Dengan demikian dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat daerah dalam menentukan kepentingannya sendiri, dan pemerintah daerah dengan proaktif dapat mengambil prakarsa yang kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Hanya dengan itu, maka otonomi daerah dapat diciptakan tanpa rekayasa yang menipu dari pemerintah pusat.

Dengan demikian peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada Pesantren yang bersangkutan untuk mengoptimalkan sumber daya

yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan, hal ini berkenaan dengan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal serta pemerataan standar pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>13</sup>

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan di mana guru sebagai pemegang peranan penting dan utama, terutama dengan adanya perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar, membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan guru dan kompetensi guru dan akan menghasilkan luaran yang optimal, serta secara substansial akan melahirkan siswa yang mampu berkompetisi di era yang serba modernisasi sekarang. Kaitannya dengan pembangunan otonomi daerah tentunya kesiapan sang anak didik terutama akan adanya otonomi daerah merupakan sebuah toleransi pemerintah pusat terhadap daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya. Aspek demokrasi yang dimaksud di sini adalah adanya optimalisasi peran serta masyarakat di daerah dalam membangun atau mengurus daerahnya sesuai dengan prakarsa dan kreativitas masyarakat tanpa semuanya harus diurus oleh pusat. Karena kecendrungan

---

<sup>13</sup> Depdikbud, *Kurikulum Sekolah Dasar Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)*, (Jakarta: Depdikbud, 1983), h. 51.

yang terjadi ketika semua harus tersentralisasi di pusat maka konsekwensinya adalah adanya keseragaman dan menafikkan keberagaman yang terjadi di daerah. Namun perlu menjadi perhatian pula bagi Negara untuk selalu menempatkan integrasi berdampingan dengan demokrasi artinya tidak selayaknya Negara hanya menitik tekankan pada demokrasi saja atau sebaliknya pada integrasi saja. Keduanya harus berjalan seiringan.



## BAB V

### P E N U T U P

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menyimak keseluruhan isi dari pada penelitian ini, maka berikut penyusun mencoba memberikan suatu kesimpulan yang memperlihatkan inti dari penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Peranan pondok pesantren Balebo di Kabupaten Luwu Utara dalam membentuk pola pikir dan zikir para santri tidak terlepas dari pola pembelajaran yang disajikan.

2. Peluang dan tantangan pesantren dalam menghadapi otonomi daerah adalah masih mengarah terhadap tingkat profesional dari sang guru dan kesiapan anak itu sendiri.

3. Tipologi pesantren yang tepat untuk mendukung otonomi daerah Kabupaten Luwu Utara yang efektif tentunya dengan

4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh guru di Pesantren Balebo dalam mengatasi kualitas belajar siswa dalam menghadapi otonomi daerah ialah

a) Memiliki pengetahuan tentang “belajar dan tingkah laku” manusia peserta didik serta mampu menerjemahkan teori itu ke dalam situasi yang riil.

b) Memiliki sikap yang tepat terhadap diri sendiri, pesantren, peserta didik, teman sejawat, dan mata pelajaran yang akan diajarkan.

c) Menguasai mata pelajaran yang akan diajarkan.

d) Memiliki keterampilan teknis dalam mengajar antara lain; keterampilan merencanakan pengajaran, bertanya, menilai pencapaian peserta didik, menggunakan strategi mengajar, mengelolah kelas dan memotivasi peserta didik.

## **B. Saran**

Setelah menyimak seluruh isi dari penulisan skripsi ini maka dapat diberikan suatu saran yang nantinya akan diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan siswa serta dedikasi tenaga pengajar di Pesantren Balebo, adapun beberapa saran yang diberikan adalah :

1. Kepada pihak pendidik/guru Pesantren Balebo agar selalu berusaha meningkatkan keprofesionalannya dalam melaksanakan profesinya sebagai tenaga pengajar agar supaya mampu seefisien mungkin dalam mengisi peranan terhadap bimbingan siswa terhadap peningkatan prestasi belajar siswa Pesantren Balebo kaitannya dengan pola pikir dan Zikir untuk mengisi otonomi daerah.

2. Kepada para guru atau pendidik dan pengurus di pendidikan sekolah, hendaklah meningkatkan mutu pendidikannya, baik dalam peningkatan metode yang digunakan, peningkatan sarana dan prasarana serta pembelajaran yang menyenangkan.

3. Kepada para pihak pendidik juga diharapkan mampu meningkatkan diri guna memacu diri pribadi yang tentunya akan lebih menjauhkan diri para siswa dari segala hambatan-hambatan atau kesulitan terhadap prestasi belajarnya.

4. Untuk para siswa senantiasa lebih memacu diri dalam hal kedisiplinan dalam belajar demi tercapainya cita-cita yang diinginkan, agar senantiasa meningkatkan kualitas pendidikannya dan menjaga citranya sebagai salah seorang lulusan Pesantren Balebo yang mampu bersaing dengan para siswa yang berasal dari sekolah-sekolah lain baik dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih dalam dunia pengetahuan agama, terutama dalam mengisi otonomi daerah yang semakin terstruktur dengan rapi dan berdaya saing yang maksimal.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Ilmu Pendidikan; Suatu Pendekatan Islam*. Jakarta: al-Qushwa, 1993.
- Abdullah, Taufik. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992.
- Ahmadi, Abu, dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ali, H.A. Mukti *Metode Memahami Agama Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Cawidu, Harifuddin, *Surprise dan Fenomena Spritualitas Masyarakat Industri (Suatu Telaah terhadap Trend Religiositus di Akhir Abad XX)*, Makalah IAIN Alauddin, Makassar, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 2000.
- Depdikbud. *Kurikulum Sekolah Dasar Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)*. Jakarta: Depdikbud, 1983.
- Depdiknas. *Panduan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Depdikbud, 1999.
- Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam, *Pembaharuan Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: DPP GUPPI, 1993.
- Dhofier, Zamazkhari. *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Feisal, Yusuf Amir. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Hobbes, Descartes Bacon, *A History of Modern Philosophy*. London: Gorhe Allan and Darwin, 1974.
- Kaho, Josef .Riwu *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Rajawali, Pers, 1991.

- Langgulung, Hasan. *Pendidikan dan Peradaban Islam*. Cet. III; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1985.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Cet. I; Yogyakarta: PSH FH-UUI, 2001.
- Mappanganro. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*. Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1999.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Cet. VI; Jakarta: Pustaka Imani, 1994.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta, 1990.
- Mukhtar, Maksum. *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*. Cet. III; Jakarta: PT. Wacana Ilmu, 2001.
- Munir, Abdul., dkk. *Religiusitas Iptek*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Purwanto, M. *Ngalim Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Qadir, C.A. *Philosphy and Science in the Islamic World*, Diterjemahkan oleh Hasan Basri dengan Judul *Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam*, Ed. I Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- Qulsyani, Mahdi. *Filsafat Sains Menurut al-Qur'an*. Cet. II; Bandung: Mizan, 1989.
- Saefuddin, A.M. et.al., *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islami*. Cet. II; Bandung: Mizan, 1990.
- Saridjo, Marwan. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: CV. Amisco, 1996.
- Sianipar, S.P. *Perencanaan Peningkatan Kinerja*, (Bahan Diklat Spoma), Jakarta: LAN, 1989.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Tafsir, Ahmaf. *Ilmu Pendidikan dalam Perpektif Islam*. Bandung Remaja Rosdakarya, 1994.

Tap MPR No. II/MPR/1998, *Tentang GBHN*. Surabaya: Bina Pustakatama, 1998.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gunung Sari, t.th.

Wahid, Maghfur. *Syariat Islam dalam Kebijakan Pendidikan Islam*. Makalah UNM, 2003.

Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Jambatan, 1960.

